



INSPEKTORAT KOTA BALIKPAPAN

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 700/106/TIM-IV/ITKOT
TANGGAL : 10 JULI 2023
TIM AUDIT : TIM IV
OBRIK : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BALIKPAPAN



EVALUASI AKIP

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Perencanaan Kinerja

25,71 dari nilai
maksimal 30,00



Pengukuran Kinerja

18,38 dari nilai
maksimal 30,00



Pelaporan Kinerja

9,87 dari nilai
maksimal 15



Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Internal 16,89
dari nilai maksimal 25



Predikat

Nilai Total 70,85 dengan Predikat BB - (Sangat Baik)

Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Saran/Rekomendasi

- Agar memperbaiki dokumen SK IKU Tahun 2021 – 2026 untuk diselaraskan dengan renstra dan perjanjian kinerja.
- Agar membuat sebuah sistem aplikasi pengumpulan data kinerja.
- Agar memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pengukuran kinerja.





PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja **Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022**.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **70,85 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,71
2	Pengukuran Kinerja	30	18,38
3	Pelaporan Kinerja	15	9,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25	16,89

Hasil evaluasi Tahun 2022 tidak membandingkan dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perubahan bobot komponen, sub komponen dan kriteria penilaiannya.



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

INSPEKTORAT

Jl. RUHUI RAHAYU I Telp./Fax. (0542) 7218734
BALIKPAPAN 76115
Email : inskot.balikpapan@yahoo.co.id

BAB I

PENDAHULUAN

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintah yang kapabel dan meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil maka dilakukan evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kota Balikpapan.

Telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022 guna mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*).

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023;

- e. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-650/2022, tanggal 30 Desember 2022, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Kota Balikpapan Tahun 2023;
- f. Surat Tugas Inspektur Kota Balikpapan Nomor: 090.1/060/REG/M/ITKOT, tanggal 26 April 2023.

2. Latar Belakang Evaluasi

Konsistensi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) akan terus dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah melalui monitoring terhadap sistem yang ada pada Perangkat Daerah dengan melakukan evaluasi terhadap Renstra, Perjanjian Kinerja, IKU, IKI, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi, LKjIP, Pemantauan Kinerja pada Perangkat Daerah.

3. Tujuan Evaluasi

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja serta penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan adalah kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

6. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan perbaikan sebagai berikut:

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
1	<p>Pengukuran Kinerja:</p> <p>a. Agar monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan eselon IV agar dilengkapi dengan simpulan keberhasilan dan kegagalan dari target kinerja yang diperjanjikan serta rekomendasi perbaikan untuk tiap kinerja tersebut;</p> <p>b. Hasil pengukuran (capaian) agar dikaitkan dalam pemberian <i>reward and punishment</i> dengan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja;- Pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target;- Pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai);- Pejabat/pegawai dengan capaian di atas standar dengan yang standar. <p>c. Hasil pengukuran kinerja atas rencana aksi perlu dilengkapi dengan simpulan kemajuan (progress) kinerja;</p> <p>d. Agar dibangun sebuah sistem informasi dalam rangka pengukuran kinerja.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <p>Belum ditindaklanjuti</p> <p>Belum ditindaklanjuti</p>	-
2	<p>Evaluasi Internal:</p> <p>a. Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan, namun belum terdapat:</p> <ul style="list-style-type: none">- Simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda;- Analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu rencana atau agenda;- Ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda.	Belum ditindaklanjuti	-

No	Rekomendasi Inspektorat	Langkah Perbaikan	Keterangan
	b. Hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan rencana aksi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan namun belum ada kesepakatan mengenai tindaklanjutnya.	Belum ditindaklanjuti	
3	Capaian Kinerja: Perlu diprioritas indikator kinerja yang belum tercapai target dalam pelaksanaan kegiatannya dan disarankan agar terus meningkatkan pencapaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dengan dukungan informasi mengenai kinerja yang dapat diandalkan.	Telah ditindaklanjuti	-

Sumber: Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor: 700/135/Tim-IV/Itkot, tanggal 2 Agustus 2022.

BAB II HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2022 menunjukkan nilai sebesar **70,85 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi AKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen yang dinilai	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Bobot	Hasil Evaluasi	Bobot	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,76	30	25,71
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13	30	18,38
3	Pelaporan Kinerja	15	11,59	15	9,87
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,79	25	16,89
5	Capaian Kinerja	20	16,43		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		75,70		70,85
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB		BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai **25,71** dari nilai maksimal sebesar **30,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Dokumen perencanaan kinerja	6,00	6,00	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah (RPJMD 2021-2026), dokumen perencanaan kinerja jangka pendek (Renja OPD tahun 2022), dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja (Perjanjian Kinerja OPD) sesuai dengan mandat; - Telah terdapat dokumen perencanaan

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
				anggaran (DPA OPD tahun 2022) yang mendukung kinerja;
2	Dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (<i>cascading</i>) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (<i>crosscutting</i>)	8,52	9,00	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen perencanaan kinerja yaitu Renstra, Renja OPD, dan Perjanjian Kinerja telah diformalkan dan dipublikasikan tepat waktu; - Sebagian besar isu strategis telah tertuang dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2021-2026 BAB III; - Sebagian besar indikator kinerja pada Renstra dan Perjanjian Kinerja telah memenuhi kriteria SMART; - Sebagian besar tujuan/sasaran tertuang dalam Perjanjian Kinerja. - Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>Cascading</i>). <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat satu sasaran dan indikator Perjanjian kinerja yang tidak selaras dengan dokumen SK IKU 2021-2026 yaitu tidak terdapat sasaran keempat Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH Kota Balikpapan; - Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja sebagian kurang menantang.
3	Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	11,19	15,00	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar anggaran yang ditetapkan dan aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung pada kinerja yang ingin dicapai; - Rencana aksi kinerja telah berjalan dinamis karena hasil monitoring dan evaluasi sebagian besar telah ditindaklanjuti. <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar target yang ditetapkan

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
				<p>dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik namun tidak cukup/kurang menantang;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang direncanakan.

b. Pengukuran Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pengukuran kinerja diperoleh nilai **18,38** dari nilai maksimal sebesar **30,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Pengukuran kinerja telah dilakukan	1,50	6	<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan. <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator; - Belum terdapat formulasi perhitungan untuk indikator utama yang ke empat yaitu pengelolaan sampah Kota Balikpapan.
2	Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif, efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	4,36	9	<ul style="list-style-type: none"> - Data kinerja telah dilakukan secara berkala dan sebagian besar data kinerja yang dikumpulkan telah relevan dan mendukung capaian kinerja. <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Setiap level organisasi telah melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya hingga unit terkecil namun belum diberikan feedback; - Pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
3	Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian <i>reward and punishment</i> , serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	12,53	15,00	<ul style="list-style-type: none"> - Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja; - Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi, Kebijakan, Aktivitas dan Anggaran dalam mencapai kinerja - Efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja didapat dari pengurangan rincian aktivitas/biaya yang tidak terkait terhadap output kegiatan. <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja:

Dari penilaian atas komponen pelaporan kinerja diperoleh nilai **9,87** dari nilai maksimal sebesar **15,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan kinerja	2,38	3,00	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja telah disusun dan disampaikan tepat waktu. <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja belum dipublikasikan secara luas (dapat diakses masyarakat luas);
2	Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/	3,11	4,50	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja tahun 2022 telah diformalkan; <p>Dari kondisi yang ada, masih terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja belum seluruhnya menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>;

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
	penyempurnaannya			<ul style="list-style-type: none"> - Laporan kinerja belum mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah; - Beberapa Capaian Kinerja Tahun 2022 belum melampaui capaian tahun sebelumnya (kondisi awal tahun 2021); - Dokumen Laporan kinerja belum menginfokan seluruh informasi analisis dan evaluasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional; - Laporan Kinerja tahun 2022 belum mengungkapkan seluruh informasi terkait analisis keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja, upaya nyata/hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan upaya perbaikan serta penyempurnaan kinerja ke depan.
3	Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	4,38	7,50	<p>Dari kondisi yang ada,terdapat beberapa hal yang masih perlu perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Informasi kinerja yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, namun hanya sebagian; - Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja, namun belum menyeluruh.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

Dari penilaian atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal diperoleh nilai **16,89** dari nilai maksimal sebesar **25,00** dengan hasil evaluasi per sub komponen sebagai berikut:

No	Sub Komponen	Nilai Diperoleh	Nilai Maksimal	Hasil Evaluasi
1	Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi	4,69	7,00	<p>Dari kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi atas hasil evaluasi kinerja belum seluruhnya ditindaklanjuti. Perlu dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.
2	Capaian <i>outcome</i>	12,20	18,00	<ul style="list-style-type: none"> - Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja (<i>outcome</i>) dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun hanya sebagian besar indikator kinerja yang mengalami kenaikan capaian kinerja <p>Dari kondisi yang ada, terdapat beberapa hal yang masih perlu perhatian, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum semua indikator kinerja memiliki formulasi perhitungan sehingga analisis dan data handal kurang memadai.

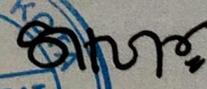
BAB III

SARAN REKOMENDASI

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan AKIP, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Agar memperbaiki dokumen SK IKU Tahun 2021-2026 untuk diselaraskan dengan Renstra dan Perjanjian Kinerja terkait dengan sasaran keempat yaitu Meningkatkan Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada DLH Kota Balikpapan, menambahkan Definisi operasional yang jelas atas kinerja dan melengkapi cara mengukur indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah;
- b. Melakukan reviu atas target indikator agar target kinerja lebih menantang;
- c. Pohon kinerja yang dibuat agar dimanfaatkan dalam perencanaan kinerja instansi;
- d. Memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) dalam melakukan pengukuran capaian kinerja;
- e. Melakukan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.
- f. Menindak lanjuti seluruh rekomendasi LHE AKIP Tahun 2021 dan Tahun 2022

Demikian hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, kami mengharapkan Kepala Perangkat Daerah beserta seluruh jajaran meningkatkan implementasi AKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan.

Inspektur Kota Balikpapan,


Silvia Rahmadina